

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Evaluasi Kebijakan Presensi Online dengan Aplikasi SIAP-ON bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan indikator menurut William N. Dunn. Evaluasi suatu kebijakan dilakukan sebagai salah satu cara untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran, serta mengetahui dampak yang terjadi akibat adanya program. Terdapat enam kriteria yang menjadi indikator evaluasi kebijakan, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

##### **1. Indikator Efektivitas**

Dari Indikator Efektivitas, Kebijakan Presensi Online dengan Aplikasi SIAP-ON bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dikatakan berhasil karena tercapainya sasaran yang diharapkan serta keterlibatan pihak terkait dalam kebijakan ini sesuai tugasnya masing-masing secara maksimal demi meningkatkan produktifitas, peningkatan kualitas pengabdian dan pelayanan serta meningkatkan kesejahteraan PNS dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati No.

31 Tahun 2018 Bab II Pasal 2 yang mana mengatur tentang tujuan pemberian Tambahan Penghasilan pada pegawai.

## 2. Indikator Efisiensi

Indikator Efisiensi berkaitan dengan sumber daya atau biaya yang digunakan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dalam pelaksanaannya menggunakan sumber daya atau biaya yang minim tetapi menghasilkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Indikator efisiensi keberhasilan kebijakan ini dinyatakan berhasil atau baik, karena kebijakan ini merupakan wujud optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Jika dibandingkan dengan kebijakan presensi sebelumnya, yakni menggunakan mesin *fingerprint*, tentu presensi dengan menggunakan Aplikasi SIAP-ON ini lebih efisien. Selain boros listrik menggunakan mesin *fingerprint* juga dinilai tidak fleksibel. Penggunaan aplikasi berbasis android yang membuat aktivitas presensi menjadi lebih fleksibel dalam gengaman. Sehingga biaya yang dikeluarkan minimal namun hasilnya maksimal, yakni pencatatan yang akurat di dalam aplikasi. Sehingga hasil dilapangan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

## 3. Indikator Kecukupan

Dari Indikator Kecukupan, dapat dilihat dari tujuan yang telah dicapai sudah dirasa mencukupi dalam berbagai hal, dengan mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan dan

menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian apakah kebijakan tersebut sudah dirasa mencukupi kebutuhan ASN. Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON ini telah diupayakan oleh pihak pelaksana yang bekerjasama dengan OPD agar mampu memenuhi apa yang menjadi hak ASN. Adanya kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan akurasi dalam penerimaan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai yang kemudian akan mendorong produktifitas, peningkatan kualitas pengabdian dan kinerja ASN.

#### 4. Indikator Perataan

Indikator Perataan pada suatu kebijakan tertentu mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila pelaksanaannya merata bagi seluruh sasaran yang direncanakan. Dalam penelitian ini indikator perataan berkenaan dengan apakah Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON ini telah dilaksanakan merata kepada seluruh ASN di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON ini dapat berjalan sesuai harapan karena dilaksanakan sesuai regulasi yang sudah dibentuk. Karena, kebijakan ini ditujukan untuk ASN yang mana keseluruhan ASN harus bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Jadi kebijakan ini baik pelaksanaan maupun manfaatnya sudah dapat dirasakan secara merata oleh ASN di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tanpa terkecuali.

## 5. Indikator Responsivitas

Indikator Responsivitas merupakan respon dari suatu aktivitas yang dikerjakan, bagaimana suatu kebijakan dapat memenuhi apa yang diharapkan penerimanya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana respon ASN sebagai penerima kebijakan terhadap Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON. Setelah melakukan wawancara, respon yang didapatkan oleh peneliti dari ASN banyak yang positif. ASN telah mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) sehingga lingkungan kerja, kinerja dan motivasi ASN untuk mengabdikan menjadi lebih meningkat. Respon positif ini memberikan dukungan terhadap pemerintah sehingga Kebijakan Presensi Online dengan Aplikasi SIAP-ON bisa semakin optimal dengan pembaharuan-pembaharuan yang dapat menunjang aktivitas kerja ASN.

## 6. Indikator Ketepatan

Pada Indikator Ketepatan, berkenaan dengan apakah hasil yang dicapai bermanfaat. Yang termasuk ketepatan adalah dampak yang dirasakan oleh ASN sebagai penerima kebijakan. Peluncuran Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON bermanfaat bagi ASN dalam mengatasi permasalahan kedisiplinan terkait kehadiran, meningkatkan motivasi kerja dan pengabdian, serta memenuhi hak ASN yakni penerimaan Tambahan Penghasilan (TPP).

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo telah berjalan dan dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan yang tertera pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021. Hal ini dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai tolak ukur dalam proses evaluasi yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Tetapi, masih ada kekurangan dalam hal sosialisasi menyeluruh terhadap pihak terkait yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai program tersebut terkhusus pada ASN yang usianya mendekati purna. Kemudian, meskipun dalam kuantitas kecil, masih ada ketidaksesuaian antara fakta dilapangan (pelaksanaan) dengan data yang disajikan, yakni berkaitan dengan data *realtime* yang masih dapat di manipulasi dengan keterangan Dinas Luar (DL) agar Tambahan Penghasilan (TPP) ASN terkait tidak mengalami pemotongan.

## **C. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyampaikan beberapa saran guna memaksimalkan Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON bagi ASN di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

kedepannya. Saran yang peneliti sampaikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan presensi *online* guna mengoptimalkan pelaksanaannya dilapangan agar manfaat dan tujuan yang dimaksud dapat benar-benar diterima ASN.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo terkhusus Admin SKPD melalui Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON harus lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sukoharjo terkait mekanisme pengiriman hasil input data dan dokumen pendukung lainnya setiap minggu serta melakukan verifikasi terhadap hasil input data dan dokumen pendukung lainnya. Hal tersebut dilakukan agar pembayaran Tambahan Penghasilan (TPP) berdasarkan rekapitulasi presensi elektronik dapat dilakukan tepat waktu tanpa adanya manipulasi, sesuai dengan jumlah kehadiran masing-masing ASN.
3. Untuk membentuk lingkungan kerja yang kondusif melalui Kebijakan Presensi *Online* dengan Aplikasi SIAP-ON, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo juga perlu menyelenggarakan kegiatan yang mendukung seperti sosialisasi, *mentoring* ataupun bimbingan teknis berkala secara

internal terhadap ASN di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo mengenai fitur-fitur baru dalam setiap pembaruan aplikasi dan aturan-aturan dalam kebijakan tersebut seperti yang tertera pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang pemenuhan hak ASN melalui TPP yang pencatatannya dibantu melalui Aplikasi SIAP-ON serta upaya pencegahan pelanggaran dalam kebijakan tersebut dan ketidakpahaman pengguna pada fitur-fitur baru pada pembaharuan aplikasi.